

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha beritikad baik terhadap hak konsumen. Pertanggung jawaban publik produsen sebagai pelaku usaha yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat. Karena itu, kepala produsen pelaku usaha dibebankan langsung tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu mulai penerapan norma – norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha

jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat analisis, dengan tujuan untuk menguraikan lebih lanjut dengan pembuktian hubungan sebab akibat antar pelaku usaha dan konsumen yang terdapat pada kasus BPOM, BPSK dan Kosumen mengenai kasus ikan yang mengandung cacing pita di dalamnya, oleh sebab itu penulis meneliti serta menghubungkan data wawancara dari pihak BPOM, BPSK dan Konsumen.

Hasil Penelitian ini dapat di ketahui bahwa pihak konsumen sangat merasa dirugikan karena bahwasannya cacing pita adalah suatu hewan yang merusak organ tubuh manusia. Dan dari pihak yang berwenang atas pemasaran produk yang sudah dibuat oleh pihak produsen, Karena minimnya pengetahuan dari pihak konsumen sulit untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha yang sudah membuat adanya kerugian bagi pihak konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM), Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK).

ABSTRACT

Consumer protection is every efforts to ensure legal certainty to provide protection to consumers. Legal certainty to protect consumer rights, which is strengthened by special laws, provides hope that businesspeople have a good faith attitude towards the consumer rights. Public responsibility of producers as business plaques that have duties and obligations to participate in creating and maintaining a healthy business climate. Therefore, the head of the producer of the business actor is directly responsible for the implementation of those duties and obligations, which is to start applying legal norms, compliance and high quality habits prevailing in the business community.

If it turns out that their rights have been impaired or violated by a business actor. The researcher used method used a legal research method that is analytical in nature in the preparation of this research, with the aim to further elaborate by proving a causal relationship between business actors and consumers be found in the case BPOM, BPSK and consumer regarding fish cases that contain tapeworms in it, therefore the researcher examines and connects interview data from BPOM, BPSK and Consumers.

The results of this study can be seen that the feel of consumer really disadvantaged because tapeworm is an animal that damages human organs. And from the authorities over the marketing of products that the manufacturer has created, they are only following up on the withdrawal of tinned fish items that have been marketed by the Manufacturers with permission from the BPOM. Because of the lack of knowledge from the part of consumer it is difficult to ask for compensation from business actors who have made a loss for the consumer.

Keywords: Consumer Protection, Drug and Food Control Agency (BPOM), Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).